

PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI ENENEM JAYA DI DISTRIK ARGUNI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Myristica Argentea Caesarindira Kabes

NPP. 31.1089

Asdaf kabupaten Fakfak, provinsi Papua Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : myristicaargentea@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Jojo Juhaeni, M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Small and Medium Enterprises (SMEs) have significant potential in each region, playing a strategic role in labor absorption, regional income, and benefiting local communities. In Fakfak Regency, SMEs are crucial for improving the standard of living, especially for those lacking higher education or belonging to small and medium communities. **Objective:** This research aims to describe the role of the Cooperative Office, Small and Medium Enterprises in empowering the Enenem Jaya Cooperative in Arguni District, Fakfak Regency, West Papua Province. **Method:** The research employs a qualitative, descriptive method with an inductive approach. It seeks to describe or illustrate the problem based on specific or general facts. The analytical method used is derived from the role theory proposed by Heroepoetri & Santoso (2003), which defines roles as policies, strategies, communication tools, dispute resolution tools, and therapeutic measures for the community. **Results/Findings:** The study concludes that the Cooperative Office and SMEs have played an optimal role in empowering the Enenem Jaya Cooperative. This empowerment includes improving the cooperative's quality and providing assistance in terms of necessary equipment. Moreover, the already effective governance system of the cooperative office requires further enhancement. **Conclusion:** The Cooperative Office, Small and Medium Enterprises in Fakfak Regency has effectively empowered the Enenem Jaya Cooperative by enhancing its quality and providing essential support. Continuous improvements in governance are necessary to maintain and build on this progress.

Keywords: Empowerment, Role, SME

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Potensi yang dimiliki setiap daerah adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah serta masyarakat lokal. Di Kabupaten Fakfak, UKM ditempatkan dalam posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Penelitian ini akan menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta yang bersifat khusus atau umum. Metode analisis yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri & Santoso (2003), yang mendefinisikan peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan juga terapi bagi masyarakat. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, sudah berperan secara optimal dalam pemberdayaan koperasi dengan meningkatkan mutu Koperasi Enenem Jaya serta memberikan bantuan dalam hal perlengkapan kebutuhan koperasi. **Kesimpulan:** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Fakfak telah memainkan peran yang optimal dalam pemberdayaan Koperasi Enenem Jaya melalui peningkatan mutu dan pemberian bantuan perlengkapan. Sistem tata kelola yang sudah baik dari dinas koperasi perlu terus ditingkatkan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Peran, UKM



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memegang peran sentral dalam usaha mencapai tujuan suatu negara dan diperlukan untuk beroperasi secara efektif. Menurut Rasyid (1996), pemerintah memiliki tiga fungsi pokok: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, yang saling terkait. Di Indonesia, fokus utama adalah pembangunan nasional, terutama dalam sektor ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam sektor ekonomi, bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam upaya mencapai tujuan ini (Drs. H. Mudji Rahardjo, 2004).

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan nasional merupakan prioritas utama. Salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah sektor ekonomi. Dalam era otonomi daerah saat ini, pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih inovatif dan kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi yang dimiliki setiap daerah adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah serta masyarakat lokal. Di Kabupaten Fakfak, UKM ditempatkan dalam posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah. Namun, keberadaan UKM juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk terbatasnya akses permodalan, pemasaran, dan manajemen yang kurang profesional.

Dinas koperasi adalah salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T, 2018). Tugas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi adalah sebagai wujud tujuan dan strategi pemberdayaan koperasi. Dengan kata lain tujuan dan strategi pemberdayaan koperasi merupakan hasil akhir yang dicari. Upaya pencapaian tujuan-tujuan koperasi diarahkan untuk mewujudkan gerakan koperasi yang sejati, mampu berswadaya atau mandiri, serta dikelola secara profesional, demokratis, dan otonom dengan tetap memegang teguh jati dirinya (Narwoko, D., J., Suyanto, & B. (2012).

Mengatasi tantangan yang dihadapi UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak perlu aktif terlibat dalam memberdayakan UKM, baik melalui pemecahan masalah teknis maupun penguatan daya saing. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Koperasi Enenem Jaya Distrik Arguni, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat anggota koperasi serta mewujudkan kemandirian koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat.

Pembinaan yang baik maka akan memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perkoperasian. Pengawasan terhadap koperasi dimaksudkan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian serta penyalahgunaan otoritas dan kedudukan (Nur,2017)

Dengan adanya pengawasan diharapkan proses kerja dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengawas atau pejabat yang menangani pengawasan terhadap koperasi perlu dibekali diklat kompetensi, juga diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang sanksi yang tegas terhadap koperasi yang tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang meliputi kepatuhan legalitas, usaha dan keuangan serta kepatuhan transaksi (Narwoko, D., J., Suyanto, & B, 2012). Kemudian dengan adanya evaluasi pelaksanaan dan pelaporan tugas maka akan mengukur sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai lalu selanjutnya menilai, sampai sejauh manakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan, dan nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali (Rosda. Muslihin. 2013) Evaluasi yang berkesinambungan akan dapat memantau tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga pada dasarnya evaluasi dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan usaha. Penyempurnaan usaha tanpa didahului dengan evaluasi adalah tidak mungkin, karena dalam melakukan penyempurnaan terlebih dahulu harus tahu apa yang harus diperbaiki, dan tahu mengapa hal tersebut harus diperbaiki. Sedangkan pelaporan tugas dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan suatu tugas yang telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana hasil dari suatu kegiatan.

Dalam konteks ini, strategi yang tepat dan terukur diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari penjelasan tersebut, pentingnya peran Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menjadi jelas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan dan efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan. Di Kabupaten Fakfak, meskipun potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) cukup besar, banyak UKM yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses permodalan, pemasaran yang kurang efektif, serta manajemen yang belum profesional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah yang dihadapi oleh UKM.

Kesenjangan lainnya terletak pada aspek pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Meskipun Dinas Koperasi memiliki tugas untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalisir penyimpangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi yang masih mengalami kendala dalam tata kelola dan

kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan yang dilakukan seringkali belum efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diinginkan dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

Selain itu, ada kesenjangan dalam hal evaluasi dan pelaporan tugas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Meskipun evaluasi dan pelaporan sangat penting untuk menilai kemajuan dan keberhasilan program pemberdayaan, praktiknya seringkali kurang terstruktur dan tidak konsisten. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan dan pelaporan yang akurat, sulit untuk mengidentifikasi masalah secara tepat dan mengembangkan strategi perbaikan yang efektif. Kesenjangan ini menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UKM secara berkelanjutan, serta mengurangi dampak positif dari program pemberdayaan yang dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2013) mengkaji peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana peran Dinas Koperasi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja UKM di daerah tersebut. Berbeda dengan penelitian lainnya, fokusnya lebih pada kota besar dengan konteks yang lebih kompleks. Hasil penelitian bahwa dinas tersebut memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan UKM. Melalui berbagai strategi seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses ke pasar, Dinas Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan kapasitas serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UKM. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi tantangan seperti kendala infrastruktur dan kebijakan yang mempengaruhi efektivitas upaya pemberdayaan tersebut. Evaluasi terhadap dampak kegiatan pemberdayaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan lapangan kerja di sektor UKM Kota Malang. Kedua, Ibrahim, M. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda" penelitian ini juga menggunakan teori peran dan pemberdayaan untuk menganalisis efektivitas program yang dijalankan oleh dinas terkait, tetapi dengan konteks lokal yang berbeda. Dengan hasil penelitian yang menyoroti pentingnya dukungan dan kebijakan dari pemerintah daerah dalam memajukan sektor UKM. Hasil penelitian tersebut mungkin menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM di Samarinda memiliki peran utama dalam menyediakan bantuan teknis, pelatihan keterampilan, akses ke pasar, serta bantuan modal untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas UKM. Penelitian tersebut juga mungkin mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kendala infrastruktur dan perizinan, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk detail lebih lanjut, direkomendasikan untuk merujuk langsung pada publikasi atau dokumen penelitian yang relevan. Ketiga, Wijaya, W. T. (2018) dalam penelitian yang berjudul "Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinas tersebut membantu pengembangan sektor UKM, khususnya dalam industri kerajinan tangan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa Dinas Koperasi dan UKM di Kota Surakarta memainkan peran penting dalam mengembangkan serta

memberdayakan UMKM sektor kerajinan tangan (handycraft). Penelitian ini mungkin menyoroti berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung UMKM, termasuk pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal, promosi produk, dan fasilitasi akses pasar. Hasil penelitian ini kemungkinan juga mengevaluasi efektivitas program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM di Surakarta. Untuk informasi lebih lanjut, disarankan untuk merujuk langsung pada sumber penelitian yang tersedia. Keempat, Erzeshita, R. (2023) "Pemberdayaan Orang Asli Papua Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua" Penelitian ini menonjolkan aspek pemberdayaan khusus bagi komunitas asli Papua dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori pemberdayaan. Kelima, Utami (2020) dengan judul "Analisis Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pengembangan Koperasi di Kabupaten Sleman". Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori peran, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan program yang diterapkan dapat mendukung pertumbuhan koperasi lokal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam pemberdayaan koperasi di wilayah yang memiliki tantangan unik seperti Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan meneliti konteks lokal yang unik ini, penelitian ini mengisi celah dalam literatur tentang pemberdayaan koperasi di daerah terpencil dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di wilayah ini.

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan baru dalam analisis pemberdayaan koperasi melalui keterlibatan langsung dan interaktif dari Dinas Koperasi dan UKM. Pendekatan ini tidak hanya melihat peran dinas dalam aspek administratif, tetapi juga bagaimana dinas tersebut berperan dalam mengatasi masalah teknis dan meningkatkan daya saing koperasi melalui program-program inovatif. Hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung lebih umum dalam membahas peran dinas koperasi tanpa mengeksplorasi detail program spesifik dan dampaknya terhadap koperasi di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan model tata kelola koperasi yang diterapkan di Koperasi Enenem Jaya, yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Model ini mencakup strategi pemberdayaan yang melibatkan komunitas lokal secara aktif dan berfokus pada kemandirian koperasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam literatur pemberdayaan koperasi, tetapi juga menyediakan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang koperasi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di daerah-daerah dengan tantangan serupa.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya pemberdayaan terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sistem tata kelola yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dalam rangka pemberdayaan koperasi tersebut, sehingga

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota koperasi.

II. METODE

Penelitian Kualitatif adalah sebuah kegiatan penelitian yang dimana peneliti juga tergabung didalamnya. Sehingga dapat mengambil sebuah pemahaman dari penelitian yang sedang diamati (Sumandi, 2008). Penelitian kualitatif mempelajari hal-hal yang terjadi dan mencoba memahami atau menerjemahkan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti (D. D., U., 2019).. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang saling berkaitan serta tidak hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi hakikatnya mencari pemahaman observasi (Sugiyono.2015). Setelah dianalisis, dari data tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan yang memiliki sifat untuk mendalami suatu unit peristiwa serta tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku pada daerah yang dilakukan objek penelitian (Moleong, 2011)

Narbuko (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Apa yang Diterapkan Oleh Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk menanggapi permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditulis oleh penulis di bab I yakni peran dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan koperasi enenem jaya di distrik arguni kabupaten fakfak provinsi papua barat. Peran yang diterapkan oleh dinas koperasi dalam pemberdayaan terhadap koperasi Enenem Jaya di distrik Arguni kabupaten Fakfak.

1. Peranan dinas koperasi dalam pemberdayaan koperasi Enenem jaya sudah cukup membantu mulai dari sarana-pra sarana hingga infrastruktur. Dinas koperasi kabupaten fakfak sudah beberapa kali memberi bantuan dalam bentuk fisik maupun tunai yang dimana diambil alih oleh bidang pemberdayaan koperasi yang bertugas memfasilitasi peralatan-peralatan di koperasi seperti lemari es untuk penyimpanan ikan, generator seterum dan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan oleh koperasi. Selain itu tugas bidang pemberdayaan juga sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap anggota aktif koperasi sesuai dengan jenis koperasi
 - b. Mendata anggota-anggota koperasi yang aktif maupun yang sudah tidak aktif
 - c. Melihat permasalahan apa yang sedang dialami oleh koperasi tersebut
 - d. Membahas hasil dan manfaat yang dikeluarkan oleh koperasi terhadap masyarakat

Pembinaan yang dilakukan oleh dinas koperasi juga merupakan pembinaan-pembinaan dasar seperti pelatihan manajemen bagi koperasi aktif serta penyaluran dan pemasaran, jadi bukan hanya membantu dalam segi fisik akan tetapi juga membantu dalam pelaksanaan pemasaran barang-barang koperasi.

Pemberdayaan dari dinas koperasi sudah dianggap baik oleh kapa bidang kelembagaan dan pengawasan dimana sudah adanya pengurus lengkap seperti ketua, sekretaris, bendahara serta keanggotaan. Bantuan dari bidang kelembagaan juga sudah diterima langsung oleh koperasi Enenem Jaya seperti bantuan dana Covid Tahun 2020, bantuan 3 Buah Lemari es, pelatihan dalam bentuk pembukuan dan kewirausahaan, dan sosialisasi tentang penerapan undang-undang koperasi pada tahun 2022.

Koperasi Enenem Jaya merupakan Koperasi nelayan dimana tiap tahunnya mendapatkan pembinaan oleh bidang kelembagaan. meskipun dinas koperasi terkadang memberi bantuan, akan tetapi dinas koperasi sudah menganggap bahwa koperasi enenem Jaya ini sudah mandiri karna tanpa diberikan bantuan dan pembinaan serta pelatihan koperasi enenem Jaya sudah sangat berkembang karena kawasannya yang strategis yaitu berada di pulau tersendiri dan sebagian besar penduduknya merupakan nelayan. Koperasi enenem Jaya juga merupakan pemasok ikan pada perusahaan BIPI dan seringkali mendapat bantuan dari BIPI sehingga dinas koperasi tidak terlalu diberatkan pada tanggungan koperasi enenem Jaya. Dinas koperasi juga mengklaim bahwa bantuan paling banyak berasal dari BIPI dibanding dengan dinas koperasi maka dari itu koperasi enenem Jaya ini sangat-sangat berkembang.

Koperasi enenem Jaya tiap minggunya dapat memuat hasil tangkapan nelayan sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada hari Selasa dan Jum'at. Pemuatan pertama sebanyak 350 kg dan pemuatan kedua sebanyak 700 kg sehingga dalam 1 (satu) minggu koperasi Enenem Jaya dapat memuat hingga 1.050 kg setara dengan 1 ton. Pemuatan ikan oleh pihak BIPI hanya 1 (satu) kali dalam seminggu dengan jadwal yang tidak tentu dengan pemuatan sebanyak 500kg.

Tujuan berdirinya koperasi Enenem Jaya ini juga untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan yang dulunya hanya bergantung pada harga jual di pasar. Sosialisasi, pembinaan serta pelatihan oleh dinas koperasi menjadikan koperasi Enenem Jaya mulai berkembang dengan baik. Koperasi enenem Jaya sudah mulai mengelola keuangan sendiri dan sudah memiliki beberapa hubungan kerja. Hanya saja koperasi Enenem Jaya juga masih membutuhkan alat pembeku ikan (ABF) sehingga koperasi enenem Jaya memaksakan peralatan lain untuk menampung ikan-ikan agar dapat beku.

2. Sistem tata kelola yang diterapkan oleh dinas koperasi perlu diperbaiki. Tercatat pada dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Fakfak memiliki 318 koperasi yang terdaftar 85 merupakan koperasi aktif, 18 merupakan koperasi tidak aktif, 131 dibubarkan. Dan dari sekian banyaknya koperasi yang ada di fakfak ada 84 koperasi yang ingin untuk diaaktifkan kembali. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan dinas koperasi akan berusaha untuk mengaktifkan beberapa koperasi yang sudah berhenti beroperasi. Koperasi Enenem Jaya merupakan salah satu koperasi aktif yang dianggap kemajuannya cukup pesat dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya yang ada di kabupaten fakfak. Perlu adanya penataan tata kelola baru bagi dinas koperasi dalam pelaksanaannya terhadap koperasi-koperasi.

Bukan hanya pada beberapa koperasi yang sudah aktif dan mulai mandiri dan berkembang selayaknya koperasi Enenem Jaya tetapi harus ada pula pengembangan terhadap koperasi-koperasi yang bubar dan tidak aktif.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan terhadap Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni telah sangat membantu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga infrastruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardani (2013) yang menunjukkan peran dinas koperasi dalam menyediakan dukungan fisik dan teknis kepada UKM di Kota Malang. Namun, penelitian ini menambahkan konteks yang lebih spesifik dengan fokus pada koperasi nelayan di wilayah terpencil Papua Barat, yang menunjukkan adaptasi peran dinas terhadap kondisi lokal yang unik.

Sistem tata kelola yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dalam pemberdayaan Koperasi Enenem Jaya menunjukkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dan bantuan fisik yang beragam. Ini sejalan dengan temuan Ibrahim (2016) dan Wijaya (2018) yang menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dari dinas koperasi untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian UKM. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dinas dalam mendukung koperasi nelayan yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyediaan alat penyimpanan ikan dan generator setrum, yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang lebih umum pada UKM di sektor kerajinan dan jasa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Koperasi Enenem Jaya telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, sebagian besar berkat bantuan dan pembinaan yang diterima dari dinas koperasi dan dukungan dari perusahaan BIPI. Hal ini kontras dengan temuan Erzeshita (2023) yang menunjukkan bahwa koperasi di Biak Numfor masih sangat bergantung pada dukungan eksternal untuk bertahan hidup. Perbedaan ini menyoroti bagaimana intervensi yang tepat dan dukungan berkelanjutan dapat membantu koperasi mencapai kemandirian yang lebih besar, serta menunjukkan pentingnya dukungan dari sektor swasta dalam memperkuat pemberdayaan koperasi.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah memainkan peran yang signifikan dan optimal dalam pemberdayaan Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak. Peran dinas koperasi terlihat dalam upaya mereka untuk meningkatkan mutu koperasi melalui bantuan perlengkapan kebutuhan seperti lemari es dan generator set, serta dalam pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi. Meskipun dinas koperasi mengakui bahwa Koperasi Enenem Jaya telah mencapai tingkat kemandirian dan perkembangan yang baik, dukungan dari dinas tetap penting, mengingat koperasi tersebut masih berada di bawah naungan dinas koperasi. Selain itu, keberadaan BIPI sebagai mitra juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan koperasi, sehingga dinas koperasi tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga di lapangan untuk pelaksanaan program-program tersebut.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan, terutama terkait tata kelola koperasi. Masalah utama termasuk minimnya pengetahuan teknologi di kalangan masyarakat, yang menghambat adopsi teknologi baru dalam operasional koperasi. Selain itu, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap program-program pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang membatasi jangkauan, serta infrastruktur yang tidak memadai turut memperburuk situasi. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, mengakibatkan perlunya penjadwalan ulang dan penundaan dalam pelaksanaan program yang penting.

Semua faktor ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi dan sumber daya tambahan untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan koperasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari laporan dan informasi internal yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Kedua, penelitian ini terbatas pada kasus Koperasi Enenem Jaya di Distrik Arguni, sehingga hasil temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk koperasi di daerah lain dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mengalami kendala dalam mengakses informasi terkait dampak jangka panjang dari program pemberdayaan dan pelatihan, serta menghadapi batasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan survei lapangan. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan rekomendasi yang diberikan, sehingga perlu diupayakan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas untuk mencakup analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan koperasi di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian mendatang sebaiknya melibatkan metode penelitian yang lebih variatif, seperti studi longitudinal dan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih akurat dan representatif. Selain itu, perlu dilakukan eksplorasi terhadap peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi, serta mengevaluasi dampak program pemberdayaan dalam jangka panjang. Penelitian juga bisa diarahkan untuk mengidentifikasi solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta mengembangkan model intervensi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme anggota koperasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- D. D., U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya. <http://repository.unj.ac.id/41743/>
- Erzeshita, R. (2023). *PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM MELALUI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA (STUDI KASUS: BUDIDAYA AYAM PETELUR)* (Doctoral dissertation, IPDN) <http://eprints.ipdn.ac.id/12744/>.
- Heroepoetri, Ahmad, S., & A., M. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=370059>
- Ibrahim, M. (2016). Peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda*, 4(1), 256-267.
- Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda
- Narwoko, D., J., Suyanto, & B. (2012). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (keempat). Kencana <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50216&lokasi=lokal>
- Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (2018). Peran dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM di kota Surabaya. *Sumber*, 29, 26-800. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Nur, D. S. (2017). *Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 5844. <http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp>
- Rosda. Muslihin. (2013). *Memahami Definisi Operasional Dalam Penelitian*. <http://eprints.ipdn.ac.id/15369/>
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: ALFABETA http://repository.upi.edu/27178/9/S_SRP_1201795_Bibliography.pdf
- Sumandi, S . (2008). *Metodologi penelitian / sumandi suryabrata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=605851>
- Utami (2020) "Analisis Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pengembangan Koperasi di Kabupaten Sleman". <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/38367/4/Bab%20I.pdf>
- Wardani, H. K. (2013). *Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/48>
- Wijaya, W. T. (2018). Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/59663/Peran-Dinas-Koperasi-dan-UKM-Kota->

